

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang mengalami perkembangan pada akuntansi sektor publik. Hal tersebut dikarenakan terdapat perubahan pada pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 6 yang menyatakan

“ Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Peraturan tersebut menimbulkan banyak isu dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan seperti terjadinya kasus penyalahgunaan dana dan terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang berlaku pada organisasi perangkat daerah. Kasus yang terjadi tersebut membuat masyarakat merasakan ketidakpuasan pada lembaga publik dalam menerapkan akuntabilitas. Lembaga publik pada dasarnya memiliki kewajiban untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan segala bentuk aktivitas yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan secara tepat waktu dan mengikuti standar akuntansi pemerintah (Putri, 2017). Hal tersebut terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang memberikan syarat bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi pemerintah. Melalui penjelasan tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah perlu menaati peraturan sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk menerapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Menurut Wicaksono (2015), akuntabilitas merupakan media pertanggungjawaban pemerintah sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan informasi dan pengungkapan dalam aktivitas pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah perlu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Salah satu diperlukan dalam mewujudkan tersebut dengan menyajikan laporan yang saat ini disebut dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Menurut Superdi (2017), penyajian laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemerintah kepada publik untuk setiap dana yang dialokasikan dengan mengikuti standar akuntansi keuangan. Adanya penyajian laporan keuangan dapat mendorong instansi publik untuk melengkapi laporan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan wajib

disajikan dengan lengkap dan jujur (Sari, 2017). Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah daerah sebelum diserahkan kepada DPRD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut diperiksa kemudian diberikan opini sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini dilakukan langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Upaya tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan diwujudkan dengan memberikan aksesibilitas laporan keuangan kepada publik. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan yang diberikan kepada pengguna dalam mengakses laporan keuangan dan tidak hanya kepada lembaga dan badan tertentu lainnya namun juga diberikan kepada masyarakat sebagai bentuk kepercayaan pemerintah dalam mengelola keuangan (Fauziah & Handayani, 2017). Melalui kemudahan dengan aksesibilitas laporan keuangan daerah tersebut diharapkan masyarakat dapat memberikan evaluasi terhadap pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Adanya penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan tidak hanya mencakup penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan. Terwujudnya prinsip-prinsip serta penerapan akuntabilitas dengan menerapkan sistem pengendalian internal. Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal menjelaskan bahwa

“Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan penjelasan diatas sistem pengendalian internal menjadi faktor untuk mendorong serta meningkatkan keefektif dan efisien, keandalan dalam laporan keuangan, pengamanan aset serta kepatuhan dalam ketetapan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu. Upaya penerapan dan peningkatan sistem pengendalian internal diperlukan pada organisasi dengan menciptakan keyakinan tercapainya tujuan dalam meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terkait penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang sudah pernah diuji oleh peneliti sebelumnya. Penelitian pertama yang dilakukan Fauziyah & Handayani (2017) dengan judul pengaruh penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa penyajian dan aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian kedua dilakukan Sabriani & Rahayu (2020) dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada skpd kota tasikmalaya menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ketiga

dilakukan Putri (2017) dengan judul pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan dan tingkat pengungkapan sukarela laporan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian keempat dilakukan Mulyanto *et al.*, (2020) dengan judul pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan desentralisasi fiskal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, penyajian laporan keuangan daerah, desentralisasi fiskal dan sistem pengendalian internal serta variabel moderating berpengaruh negatif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian terakhir yang dilakukan Defana & Rahayu (2023) dengan judul pengaruh kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil dan kesimpulan dari penelitian terdahulu yang tidak konsisten membuat peneliti termotivasi untuk menguji kembali pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan subjek yang berbeda yaitu Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti memilih Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena pada tahun anggaran 2019 Laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengencualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia. Akan tetapi opini WTP yang diberikan oleh BPK tersebut tidak menutup bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak memiliki kesalahan. Dilansir dari laman yogyakarta.bpk.co.id hasil audit yang dilakukan BPK ditemukan adanya ketidaktepatan serta kurangnya pengawasan dari pejabat pelaksana kegiatan dalam pengelola keuangan yang berakibat pengembalian kelebihan / kerugian atas kejadian tersebut selain itu, ditemukan juga ketidakpatuhan dalam perundang-undangan dan kelemahan pada sistem pengendalian internal. Kemudian dilansir pada laman dprd-diy.go.id pada tahun anggaran 2022 kembali Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ditemukan permasalahan yang harus ditindaklanjuti mengenai pengelolaan keuangan serta kebijakan dalam pengawasan sistem pengendalian internal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mengangkat judul “**Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah terdapat pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Apakah terdapat pengaruh sistem pengendalian terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih fokus maka peneliti memberikan batasan masalah dengan membahas pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah serta sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas , tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan menjadi bahan referensi untuk melakukan penelitian dengan judul yang sama dengan subjek yang berbeda dan menjadi pembuktian empiris.
2. Manfaat Praktik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi untuk menerapkan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan.

1.6 Sistematika Pembahasan Penelitian

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat

Bab II Dasar Teori dan Pengembangan Hipotesis : Bab ini berisi tentang tinjauan terdahulu serta kerangka teori terkait penelitian

Bab III Metode Penelitian : Bab ini berisi objek dan subjek, metode pengumpulan data, sampel, populasi, operasional variabel serta analisis data

Bab IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini berisi analisis data serta pembahasan hasil untuk pembuktian hipotesis

Bab V penutup : Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran.

